# DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku


Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Asy'ari, Hasyim. *Konsolidasi Demokrasi: Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.

Arifin, Firdaus, dan Fabian Riza Kurnia. *Penjabat Kepala Daerah*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Eisenstadt, S. N., ed. *Max Weber on Charisma and Institution Building*. Chicago: University of Chicago Press, 1968. Dikutip dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Fuady, Munir. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusamedia, 2009.

International IDEA. *The Global State of Democracy*. Stockholm: International IDEA, 2021.

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2001.

Mayo, Henry B. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press, 1960. Dikutip dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Muhdar, Muhamad. *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. Samarinda: Universitas Mulawarman Press, 2017.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Soehino. *Ilmu Negara*. Cetakan ke-7. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2015.

Suseno, Franz Magnis. *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia, 1997.

Syafrudin, Ateng. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Orasi Dies Natalies Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1983. Dikutip dalam Enny Nurbaningsih, *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Weber, Max. *Wirtschaft und Gesellschaft*. Tübingen: Mohr, 1922. Dikutip dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

**Jurnal**

Abustan. "Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah di Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3 (November 2022): https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.22202. 275.

Amaris, Putu Kanitha Putri, dan Ni Made Nurmawati. "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila pada Pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara." *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 7 (2023): 410.

Arnazaye, Furaihan Kamyl, Ariq Nabil Sulaiman, dan Muh. Imam Kastholani. "Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dalam Perspektif Demokrasi dan Teknokrasi." *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara* 17, no. 1 (2023): https://doi.org/10.52434/jp.v17i01.188. 31

Bierstedt, Robert. "An Analysis of Social Power." *American Sociological Review* 15 (Desember 1950): 732. Dikutip dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. 732

Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. "Mewujudkan Sistem Meritokrasi Pasca Lahirnya Kewenangan Penjabat Kepala Daerah untuk Memutasi Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 3 (2024): https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art2. 513.

Harjudin, Laode, La Tarifu, Harnina Ridwan, dan La Ode Muhammad Elwan. "Menggugat Penunjukkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Tanpa Pemilihan." *Journal Publicuho* 5, no. 4 (2022): https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.73. 1356.

Parsons, Talcott. "The Distribution of Power in American Society." *World Politics* (Oktober 1957): 139. Dikutip dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. 139.

Rawung, Franqois Steward, Jacobus R. Mawuntu, dan Donna O. Setiabudhi. "Kajian Yuridis Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): https://j-innovative.org/index.php/Innovative. 7583.

Rindengan, Theresia Joan, Telly Sumbu, dan Donna Okthalia Setiabudhi. "Perbandingan Kewenangan Kepala Daerah." *Lex Privatum* 15, no. 2 (2025). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/60626. 6.

Seputra, Hawreyvian Rianda, dan Suyatno. "Kekuasaan Sebagai Dasar Legitimasi Hukum." *Al Mikraj* 5, no. 1 (2024): https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.6234. 1210.

Sumitro, dan Yorman. "Legitimasi Pemerintah." *SEIKAT* 3, no. 5 (2024): https://doi.org/10.55681/seikat.v3i5.1578. 247.

Wardhani, Lita Tyesta Addy Listiya, Farid Ibrahim, dan Adissya Mega Christia. "Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.305-318. 316.

**Internet**

Dedi Irawan. "Histori Pilkada di Indonesia." KPU Kabupaten Tangerang. Diakses 15 Agustus 2025. https://kab-tangerang.kpu.go.id/blog/read/histori-pilkada-di-indonesia.

Kompas.com. "Jelaskan Alasan TNI Aktif Jabat Pj Bupati." 16 Juni 2022. Diakses 28 Oktober 2025. https://nasional.kompas.com/read/2022/06/16/12454401.

Liputan6.com. "Mendagri soal Pj Kepala Daerah." Diakses 28 Oktober 2025. https://www.liputan6.com/news/read/4970343.

Medcom.id. "Apa Itu Eselon?" Diakses 27 Desember 2025. https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/5b2wYXVk

Reaksi.co.id. "Kok Bisa Tanpa Sidang Paripurna." 15 Desember 2023. Diakses 31 Desember 2025. https://reaksi.co.id/2023/12/kok-bisa.

SinPo.id. "Tiga Nama Calon Pj Gubernur." 13 September 2022. Diakses 28 Desember 2025. https://sinpo.id/detail/36981

**Tesis**

Ramdani, Dadan. "Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2022.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.

**Sumber Lain**

Bahtiar, Rais Agil. “Kebutuhan Penjabat dalam Pengisian Kekosongan Jabatan.” *Info Singkat* XIV, no. 8 (2022). Jakarta: DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. “Legitimasi.” Diakses 1 November 2025. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/legitimasi

MPR RI. “Kajian Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia.” 2023. https://www.mpr.go.id/img/jurnal/file